

Peran Keputusan Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Terhadap Dana Lembur Di Kantor Walikota Medan

Ummi Rahayu Saragih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail : ummirahayusaragih1@gmail.com

Nurlaila Nurlaila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail : nurlaila@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Abstract: *The purpose of this research is to determine the role of the Bappeda treasurer's decisions regarding overtime funds. This research uses qualitative methods with process analysis and inductive thinking related to the dynamics of the relationship between the symptoms studied, while still using scientific thinking. By using descriptive methods. The treasurer has the task of carrying out some of the secretary's duties within the scope of financial administration management. The role of the Treasurer or finance sub-division is very much needed in disbursing overtime funds. And these overtime funds are issued by fulfilling several conditions that have been written down.*

Keywords: *Treasurers Decision, Overtime Funds, Bappeda*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran keputusan bendahara Bappeda terhadap dana lembur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis proses serta berfikir secara induktif yang berhubungan dengan dinamika ikatan antara gejala yang diteliti, serta tetap menggunakan pemikiran ilmiah. Dengan menggunakan metode deskriptif. Bendahara mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas sekretaris pada lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Peran Bendahara atau sub bagian keuangan sangat dibutuhkan dalam pengeluaran dana lembur. Dan dana lembur ini dikeluarkan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang telah di tuliskan.

Kata kunci: Keputusan Bendahara, Dana Lembur, Bappeda

LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu alat yang digunakan Pemerintah guna mencapai tujuan yang diinginkan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusun peraturan tentang manajemen keuangan negara dalam proses bisnis serta penyediaan kapasitas tenaga kerja yang berkaitan pada manajemen keuangan negara, baik itu dalam hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran penting tersebut ditunjukkan melalui partisipasi sumber daya manusia dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas keuangan (Habibi, 2021).

Saat ini pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh bendahara seluruh Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan Republik Indonesia (BPKPRI) mengembangkan program aplikasi perencanaan keuangan daerah yang disebut juga SIMDA Finance pada

tahun 2003. Hingga saat ini, ratusan pemerintah daerah dan pemerintah kota di seluruh Indonesia telah menggunakan SIMDA Finance untuk integrasi daerah. manajemen keuangan, yang meliputi penganggaran, manajemen, akuntansi, dan pelaporan (Yanto & Afkir, 2020).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, program penerapan SIMDA Keuangan sangatlah penting, namun belakangan ini pemerintah daerah khususnya Kota Medan juga menerapkan program pemerintah lainnya yaitu sistem transaksi non tunai .

Kantor Walikota Medan merupakan instansi yang menjadi pusat pemerintahan kota Medan. Di kantor walikota, kepala daerah atau walikota menjalankan kegiatan pemerintahan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ialah sebuah organisasi pemerintahan yang berfokus guna membantu gubernur dalam mengatur pembangunan di wilayah Sumatera Utara (Rahma Ningsih Lubis, 2020). Tugas badan tersebut memerlukan perencanaan arus kas yang efektif dan efisien. Mengingat peran arus kas pada operasional perusahaan, maka ia wajib memeriksa bahwa penerimaan kas telah berjalan secara efisien.

Upah lembur merupakan uang yang dibayarkan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bekerja lembur minimal satu jam. Jika lembur pada hari Minggu dan hari libur, gaji lembur per jamnya digandakan (200%). Bayaran lembur dapat meningkatkan semangat dalam bekerja dalam menyiapkan tugas dan bekerja di luar jam kerja. Selain upah lembur, PNS yang bekerja lembur juga mendapat uang makan minimal 2 jam berturut-turut (Fresilina et al., 2023).

Perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi kini memberikan dampak yang besar mengenai berbagai aspek kehidupan. Keuntungan menggunakan website adalah sebagai sistem informasi lembur bagi pegawai Kantor Wali Kota Medan, salah satu bagian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di bagian ini, perhitungan lembur dapat dilakukan melalui kehadiran melalui website (Lutfiah Hanifah, 2023).

Bendahara diartikan setiap individu atau badan yang memiliki tugas dalam menerima, menahan, membayar, dan memindahtangankan dana, surat berharga, atau kekayaan daerah atau milik negara atas nama negara atau daerah. Tanggung jawab dan wewenang bendahara meliputi menerima, menahan, mengeluarkan, mengawasi, dan mencatat uang untuk belanja staf (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Pengeluaran pegawai, kecuali tugas yang berkaitan dengan pelatihan, adalah pembayaran yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di luar negeri atau di dalam negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Pengeluaran yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan, tunjangan makan, lembur, dan pengeluaran pegawai lainnya semuanya termasuk dalam kategori ini. lowongan (NISRINA, 2018).

KAJIAN TEORITIS

1. Keputusan

Keputusan adalah sebuah pilihan yang berjalan menuju tujuan yang diharapkan. Keputusan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengambilan tindakan dari seluruh alternative guna menyelesaikan suatu permasalahan. Hasam mengatakan bahwasannya keputusan merupakan hasil pemecahan masalah yang wajib dapat menjawab sebuah oertanyaan mengenai yang di bahas dalam perencanaan. Dimana suatu keputusan terdiri dari perlakuan mengenai pelaksanaan yang sangar menyimpang dari rencana semula (Setiyaningsih, 2015).

Keputusan terdiri dari 3, diantaranya adalah :

1. Pilihan terstruktur adalah pilihan yang dapat dikerjakan secara komprehensif dan mempertimbangkan semua atau sebagian besar variabel yang berperan. karena ini adalah keputusan normal yang membutuhkan pendapat banyak orang.
2. Keputusan yang hanya mengandalkan intuisi dan tidak dapat dilakukan komputerasi disebut tidak terstruktur.
3. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang dapat dikoordinasikan oleh banyak pihak, namun tetap memerlukan masukan dari banyak pihak.

2. Bendahara

Dalam UU NO. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa bendahara adalah orang perseorangan atau organisasi yang bertugas menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan surat berharga atas nama Negara atau daerah bahkan aset negara atau daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Bendahara penerimaan atau pengeluaran adalah jabatan bendahara yang tugasnya mengambil alih tanggung jawab dan wewenang bendahara umum negara atau daerah pengelolaan berbagai dana atau surat berharga yang dikelolanya sebagai bagian dari pelaksanaan APBD (Habibi, 2021).

Dalam penelitian ini hanya merujuk pada bendahara bagian bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang termasuk dalam subbagian keuangan. Sub Bagian Keuangan merupakan orang yang bertugas membantu Bendahara dalam melakukan pembayaran kepada pihak yang diberi izin untuk melakukan usaha. Tugas dan fungsi sub bagian keuangan (bendahara) antara lain :

1. Membantu melakukan perencanaan anggaran dana sesuai keperluan dan penetapan dana.
2. Mengatur pencairan anggaran.

3. Melakukan administrasi keuangan.
4. Melakukan pembayaran transaksi keuangan.
5. Menjamin terhadap keamanan penyimpanan keuangan.
6. Membantu pelayanan konsumsi rapat dan kegiatan lainnya.
7. Membuat laporan keuangan.
8. Membuat laporan keuangan bulanan kepada sekretasis dan BPK.
9. Bertanggung jawab terhadap berbagai aspek keuangan kepada BPK.

3. Dana Lembur

Dana lembur yaitu upah seluruh kegiatan yang wajib dilakukan oleh PNS pada saat tertentu di luar jam kerja, yang diberikan oleh masing-masing instansi dan kantor pemerintah. Pemberian upah lembur bertujuan untuk menambah semangat kerja dalam melakukan tugas dan kerja lembur (Bagaskara & Sahfitri, 2022).

Pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih lama dari biasanya disebut lembur. Karena gajinya lebih tinggi, kerja lembur dikenal menarik bagi karyawan. Penghasilan dari adanya kerja lembur ini biasa dikatakan sebagai dana lembur. Dana lembur adalah penghasilan yang di dapat secara teratur, seperti gaji, tunjangan, pengakuan, dan fasilitas lainnya dari perusahaan. PP Nomor 36 Tahun 2021 menyebutkan, upah lembur merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya yang bekerja lembur. lebih lama dari hari kerja biasanya (kerja lembur) (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berikut mengenai penghitungan dana lembur yang berdasarkan PP No. 36 Pasal 32 dan 33 Tahun 2021:

1. Gaji bulanan digunakan untuk menentukan dana lembur.
2. Upah per jam yang diantisipasi sama dengan 1/173 upah bulanan.
3. Lembur dianggap 100% penghasilan apabila komponen upah terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
4. Untuk komponen penggajian seperti gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, kompensasi lembur diperkirakan sebesar 75% dari seluruh pendapatan jika gaji pokok dengan tunjangan tetap kurang dari 75% dari seluruh gaji.

Berdasarkan PP Pasal 32 No.36 Tahun 2021, gaji bulanan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut apabila gaji diunggah setiap hari:

1. Perkiraan upah harian bagi buruh atau pegawai yang bekerja enam hari dalam seminggu adalah $x \cdot 25$.

2. Rata-rata upah harian bagi buruh atau pegawai yang bekerja lima hari dalam seminggu adalah $x/2$.
3. Gaji bulanan sama dengan rata-rata upah tahun sebelumnya apabila pekerja atau pegawai menerima upah kelompok.
4. Gaji bulanan yang menjadi dasar penentuan waktu lembur adalah gaji minimum yang berlaku di tempat pekerja bekerja apabila gaji bulanan pada ayat 2 kurang dari gaji minimum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memadukan analisis dan metodologi kualitatif proses serta berfikir secara induktif yang berhubungan dengan dinamika ikatan antara gejala yang diteliti, serta tetap menggunakan pemikiran ilmiah. Dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik untuk mengetahui nilai dari satu atau lebih variabel (independen), atau variabel individual, tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

Yang dimaksud dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan adalah lembaga pendorong fungsi walikota dibawah kepemimpinan kepala bagian yang mendasarinya serta bertanggung jawab terhadap Walikota Medan oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan Pembangunan terjadi dalam tiga jangka waktu: jangka panjang (20 perang), menengah (5 perang), dan jangka pendek (1 warsa). Tugas dari BAPPEDA Kota Medan adalah menyusun perencanaan yang terbuka, kritis, terukur, menyeluruh dan bertanggung jawab melalui langkah- tindakan nyata dengan mempertimbangkan sejumlah potensi dan karakteristik pertumbuhan terkait di Kota Medan (Fachrozie & Syarvina, 2022).

Kantor Walikota Medan menjadi titik penelitian saya, yang berada di Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Medan City, North Sumatra 20231; Jl. Captain Maulana Lubis No. 2 yang merupakan salah satu kantor pemerintahan di kota Medan. Fokus penelitian ini terkait Peran Keputusan Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap Dana Lembur.

Data dikumpulkan dengan beberapa yaitu melalui observasi lapangan langsung untuk mengumpulkan informasi konkrit mengenai kondisi objek kajian yaitu pada saat melakukan magang selama satu bulan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian berjalan bersamaan dengan analisis data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Diantaranya pemilihan data ialah

mengumpulkan seluruh data yang didapat, menyajikan data pada tahap pengumpulan data untuk dianalisis, dan terakhir menarik kesimpulan pada tahap penutup permasalahan yang sedang dibahas, berdiskusi secara tepat dengan menggunakan bahasa yang ditafsirkan dengan luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga yang melakukan intervensi mengenai pembangunan disetiap daerah. Berdasarkan UU Walikota Medan NO. 32 Tahun 2007 yang membahas Tanggung jawab dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan telah ditetapkan rincian tugas dan fungsinya. Organisasi yang mengatur urusan pemerintahan disebut Bappeda. dipimpin oleh seorang kepala lembaga, berwenang kepada Walikota Medan dan bertanggung jawab kepadanya melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) (NISRINA, 2018).

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU No.25 Tahun 2004 terdapat 5 tujuan penyelenggaraan SPPN, yaitu:

1. Mendukung pergerakan oleh subjek pembangunan.
2. Menjamin terbentuknya integrasi,koordinasi dan sinergitas aspek wilayah, aspek ruang, aspek periode dan aspek fungsi pemerintahan serta antara pusat dan daerah.
3. Memastikan keselarasan antara perencanaan keuangan, pelaksanaan, pengawasan, dan perencanaan.
4. Memaksimalkan partisipasi masyarakat.
5. Memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara adil, efisien, dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 2004).

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan (Bendahara) di BAPPEDA Walikota Medan

Tugas bendahara adalah melaksanakan fungsi kesekretariatan tertentu dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan. Bendahara Keuangan menyelenggarakan fungsi selama menjalankan tugasnya sebagai berikut:

Menyusun kebijakan teknologi untuk kebutuhan pengelolaan keuangan sebagai landasan dalam melaksanakan pekerjaannya.

1. Mengirimkan rencana kerja anggaran sebagai dokumen pengguna anggaran.
2. Mengelola keuangan secara terorganisir dengan mengikuti rekomendasi teknis pengelolaan keuangan.
3. Berkomunikasi dengan atasan mengenai pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis untuk petunjuk lebih lanjut.

4. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas penilaian.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan baik sesuai tugas lain yang diminta atasan
6. Fungsi dari Sub Keuangan setiap daerah sudah pasti berbeda. Bagian keuangan lebih kepada pengelolaan keuangan BAPPEDA, baik arus kas keluar maupun arus kas masuk, yang dikelola secara terstruktur dan rinci oleh sub keuangan yang dipimpin oleh kepala departemen dan didukung oleh bagian keuangan, disponsori oleh bendahara dan staf keuangan.

Sub bagian keuangan juga mempunyai fungsi untuk seluruh dana yang ada pada individu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seperti dana lembur. Untuk memenuhi syarat pendanaan lembur, diperlukan beberapa ketentuan dan harus dipatuhi oleh sub bagian keuangan.

Ketentuan tentang upah lembur (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018) :

1. PNS dapat diminta bekerja lembur jika dibutuhkan untuk keperluan resmi;
2. Pimpinan instansi yang akan mengeluarkan Surat perintah lembur sesuai dengan perintah kerja;
3. Personel pemerintahbekerja lembur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam penuh setiap kali mendapat upah lembur;
4. Besarnya kompensasi lembur untuk setiap jam kerja lembur penuh yang dilakukan seorang pekerja ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Biaya Masukan (SBM);
5. Di Hari libur, upah lembur dibayar sebesar 200% (dua ratus persen).
6. Upah lembur diberikan sekali dalam sebulan, paling cepat di awal bulan berikutnya;
7. Upah yang dibayar sesuai dengan ketentuan pendapatan dan belanja Negara di akhir tahun pembiayaan, dikhususkan untuk upah lembur di bulan Desember;
8. Pengajuan pembayaran lembur bisa dilakukan setiap beberapa bulan;
9. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang SBM, maka akan diberikan penambahan makanan terhadap PNS yang lembur minimal selama 2 jam berturut – turut;
10. Peraturan Menteri Keuangan juga mengatakan mengenai upah lembur akan diberikan secara pembayaran langsung ke setiap rekening pekerja lembur yang akan diberikan oleh bendahara.
11. Lampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lembur :
 - a. Harus tertera tandatangan PPABP,KPA/KPK serta Bendahara pengeluaran pada data dan ringkasan perhitungan lembur;
 - b. Dalam kerja lembur harus memiliki surat perintah

- c. Daftar jam kerja selama sebulan;
 - d. Daftar hadir lembur;
 - f. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21;
12. Lampiran SPM Uang Lembur :
- a. Surat perintah membayar (SPM) sebanyak dua rangkap;
 - b. Daftar rekening menerima pembayaran jika yang menerima pembayaran lebih dari 1 orang;
 - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21;
13. SPM 2 rangkap beserta ADK Uraian SPM Uang Lembur

Tabel 1.
Data Belanja Lembur Per Desember 2022

Keterangan Dok	Nilai Realisasi
Belanja lembur bulan November 2022 Tentang penginputan data ke Aplikasi SIMDA FMIS untuk laporan buku kas umum, pajak dan SPJ fungsional	9.007.000
Belanja lembur kegiatan penginputan P APBD Bappeda Kota Medan Tahun 2022 Bulan Agustus	8.688.000
Belanja lembur kegiatan Verifikasi P APBD Bappeda Kota Medan untuk Bulan Agustus Tahun 2022	10.463.000
Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan Renja OPD dan Verifikasi Penginputan pada SIPD untuk Bulan Desember 2022	6.685.000
Belanja Lembur untuk membuat proses pembayaran (SPP & SPM) dan membuat laporan akhir tahun tutup buku	19.707.500
Belanja Lembur Kegiatan Penetapan Potensi Parkir, Persiapan IMT-GT Bulan Oktober 2022	2.187.000
Belanja Lembur Kegiatan Persiapan Ekspose, Pidato dan Narasi Pemerintah Kota Medan dalam Acara UNCRD Bulan November 2022	3.783.000
Belanja Lembur untuk membuat proses pembayaran (SPP & SPM) dan membuat laporan akhir tahun tutup buku	2.191.500
Belanja Lembur Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah untuk Bulan November 2022	2.805.000
Belanja Lembur Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bulan Oktober-November 2022	10.110.000
Belanja Lembur Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Bulan Desember 2022	1.650.000
Belanja lembur kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan	5.160.000
Belanja Lembur Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,RKPD)	10.110.000
Bulan Oktober-November 2022 Belanja Lembur Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Bulan November 2022	930.000
Belanja Lembur Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia untuk Bulan November-Desember 2022	5.720.000
Belanja Lembur Bulan Agustus 2022 Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kota Medan	9.635.000
Biaya lembur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) September 2022	11.088.000
Belanja Lembur Bulan November 2022 Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kota Medan	15.414.000
Belanja Lembur Kegiatan Melaksanakan Koordinasi antara Mitra Bappeda dan OPD lain	12.994.000
Belanja Lembur Kegiatan Melaksanakan Fasilitasi P RKPD di bawah koordinasi lingkup bidang perekonomian	9.919.000
Belanja Lembur Bulan Oktober 2022 (Pendataan Perusahaan Penyalur Dana CSR di Kota Medan) Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kota Medan	10.968.000
Belanja Lembur Bulan November 2022 (Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan	12.095.000
Pembangunan dan Keuangan Daerah) Bidang Perekon Belanja Lembur Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Bulan Desember 2022	11.578.000
Belanja Lembur Kegiatan Pelatihan Bagi Kaum Difabel pada Program BDC dari tanggal 7 s/d 31 Oktober 2022	6.010.000
Belanja Lembur Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja OPD Bulan Oktober 2022	14.694.000
Belanja Lembur Kegiatan Rencana Kerja Program Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Daerah TA 2022 Bulan September 2022	10.621.000
Belanja Lembur Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD pada SIPD untuk Bulan Agustus 2022	10.140.000
Belanja Lembur Kegiatan Pelaksanaan Menghimpun Program/Kegiatan OPD dalam Rangka Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bulan Desember 2022	7.578.000
Belanja Lembur Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penyerapan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran 2022 Bulan November	11.292.000
Belanja Lembur Kegiatan Persiapan Ekspose, Pidato dan Narasi Pemerintah Kota Medan dalam Acara UNCRD Bulan November 2022	7.360.000
Belanja Lembur Kegiatan Persiapan Ekspose Pidato dan Narasi Pemerintah Kota Medan dalam Acara UNCRD Bulan November 2022	5.339.000
Belanja Lembur Kegiatan Verifikasi R-APBD 2023 OPD Bidang infrastruktur dan Wilayah untuk Bulan November 2022	5.286.000
	271.208.000

KESIMPULAN DAN SARAN

Yang dimaksud dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan adalah lembaga pendorong fungsi walikota dibawah kepemimpinan kepala badan yang mendasarinya dan bertanggung jawab terhadap Walikota Medan oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab dalam menyusun serta melaksanakan pertauran daerah di bidang pembangunan yang bersifat 3 jangka waktu: jangka menengah (5 siklus), jangka pendek (20 siklus), dan jangka panjang (setahun). Bendahara mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas sekretaris pada lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Peran Bendahara atau sub bagian keuangan sangat dibutuhkan dalam pengeluaran dana lembur. Dan dana lembur ini dikeluarkan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang telah di tuliskan.

DAFTAR REFERENSI

- Bagaskara, A., & Sahfitri, V. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Absensi Pegawai Lembur Pada Bagian Keuangan Kantor Walikota Palembang. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Vokasi (Semhavok)*, 3(2), 73–80. <https://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/2637>
- Fachrozie, R., & Syarvina, W. (2022). Anaysis of the Roe and Functions of the Finance Section of BAPPEDA in the Sustainabiity of Medan City Panning and Deveopment. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 2(1), 235–238. <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.574>
- Fresilina, J. I., Kusuma, M., & Kusumaningarti, M. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No . 7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 34–56.
- Habibi. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 122–132. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/2135/1038>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran Final, 2018*. 148–170.
- Lutfiah Hanifah, Nurlaila. (2023). EFEKTIVITAS KINERJA BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MEDAN. *CAKRAWALA*, 4(1), 88–100.
- NISRINA, A. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA. *Gender and Development*, 120(1), 0–22. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf<http://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html>http://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info

- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6. [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf)
- Rahma Ningsih Lubis. (2020). *KINERJA PELAKU SUB. BAGIAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTAMEDAN*.
- Setiyaningsih, W. (2015). Konsep Sistem Pendukung Keputusan. In *Yayasan Edelweis* (Vol. 1).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32. [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf)
- Yanto, E., & Afkir, M. (2020). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v3i1.2819>